

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. H., & Apriliawati, Y. (2022). Analisis Penerapan *E-Faktur* PPN Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusahan Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *Indonesian Accounting Literacy Journal*.
- Agurahe, Y. (2019). Evaluasi Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Anam, A., Herawati, R., Prajanto, A., & Kinasih, H. W. (2022). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dipengaruhi Oleh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2019-2022) . *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Anwari, A., & Bandiyono, A. (2021). Analisis Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau. *Educoretax*.
- Aprilianti, A. A., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2018). Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Kajian Akuntansi*.
- Araffah, M. R., & Purnama, I. (2020). Hubungan Motivasi Kerja Dengan Produktivitas Pegawai Pada Kantor Setda Kabupaten Bima. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Aulia, Y., & Windha, I. S. (2021). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pabean*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019*. Jakarta.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (N.D.). *Realisasi Pendapatan Negara* . Retrieved From <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Desmon, & Hairudin. (2022). Pengaruh *Self-Assessment System* Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- DJPB KEMENKEU RI. (2019). *Realisasi APBN PER 31 DESEMBER 2018*. Retrieved From Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan: <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3048-realisasi-apbn-per-31-desember-2018.html>
- DJPB KEMENKEU RI. (2020). *Realisasi APBN PER 31 DESEMBER 2019*. Retrieved From Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan: <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3155-realisasi-apbn-per-31-desember-2019.html>
- DJPB KEMENKEU RI. (2021). *Realisasi APBN PER 31 DESEMBER 2020*. Retrieved From Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan: <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671-realisasi-apbn-ta-2020.html>
- DJPB KEMENKEU RI. (2022). *Realisasi APBN PER 31 DESEMBER 2021*. Retrieved From Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan: <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3924-realisasi-apbn-per-31-desember-2021.html>
- Felani, M. R., & Fidiana. (2022). Kepatuhan Pelaporan *E-Faktur 3.0* Berdasarkan Persepsi Efikasi Diri, Kebermanfaatan, Dan Kemudahan. *Jurnal Kajian Akuntansi*.

- Fitri, W. L., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Bandung Conference Series: Accountancy*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustiani, R. (2021). Analisis Penerapan *E-Faktur Prepopulated* Dan *E-Faktur WEB Based*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Heri, A. (2019). *APBN Dan APBD*. Retrieved From <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/fileupload/apbn%20dan%20apbd-bb/topik-4.html>
- IAI. (2020). *Pajak Terapan Brevet AB*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilham, Ka, V. S., & Asriadi, N. M. (2019). Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, DAN STP PPN Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan . *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 47-57.
- Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 114-122.
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*.
- Kembaren, L. J. (2021, September 23). *NEWS CNBC INDONESIA*. Retrieved From CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210923102127-4-278510/setoran-pajak-naik-terus-sri-mulyani-ekonomi-kita-pulih>
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Masyitah, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM.
- Maulida, R. (2018, September 13). *Online Pajak*. Retrieved From Online Pajak : <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/penagihan-pajak>
- Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten Dan Jasa Digital Dari Penyedia Luar Negeri. *Scientax*.

- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* .
- Mispa, S. (2019). Pengaruh *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*.
- Mukarromah, A. (2018, November 12). *Mekanisme Restitusi PPN Di Indonesia*. Retrieved From News DDTC: <https://news.ddtc.co.id/mekanisme-restitusi-ppn-di-indonesia-14163>
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*.
- Pratiwi, S. A., Suryani, E., & Kurnia. (2019). Pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*.
- Priatna, A., & Rumaizha, R. (2022). Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Elektronik (*E-Faktur*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Purba, R. (2019). Pengaruh *Self Assesment System* Dan Ketepatan Pelaporan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter*.
- Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*.
- Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). Valuasi Penerapan Sistem *E-Faktur 3.0* Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada CV. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Santoso, Y. I. (2019, DESEMBER 29). *NASIONAL KONTAN*. Retrieved From *KONTAN.CO.ID*: <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-2019-semakin-jauh-dari-target-apa-yang-salah?page=all>

- Santoso, Y. I. (2021, JANUARI 6). *Nasional Kontan*. Retrieved From *KONTAN.CO.ID*: <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-tekor-rp-1288-triliun-di-tahun-2020-ini-penjelasan-sri-mulyani>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research Methods For Business (8th Editions)*. Wiley.
- Setiaji, H. (2020, Agustus 3). *NEW CNBC INDONESIA*. Retrieved From *CNBC INDONESIA*: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200803124903-4-177080/terbukti-sah-meyakinkan-rakyat-ri-kena-masalah-daya-beli/2>
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekonomi Bisnis Ekuivalensi*.
- Suwiknyo, E. (2019, FEBRUARI 20). *EKONOMI DAN BISNIS*. Retrieved From *PAJAK*: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190220/259/891420/penerimaan-ppn-terpuruk-karena-restitusi-pajak>
- Zulfa, R., Sahara, K., & Wahyudi, M. (2018). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. *Cendekia Akuntansi*.

SUMBER PERATURAN

- Direktur Jenderal Pajak. (2013). *Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per - 20/Pj/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan PKP, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan PKP Serta Perubahan Data Dan Pemindahan WP*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2014). *PER Dirjen Pajak Nomor 16/Pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2021). *PER Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 09/PJ/2021 Tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2010). *PMK NOMOR 71/PMK.03/2010 Tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak*
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2010). *PMK NOMOR 72/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). *PMK NOMOR 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). *PMK Nomor 197/PMK.02/2015 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan/ Atau Surat Tagihan Pajak Yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, Atau Penelitian Pajak*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). *PMK Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *KMK Nomor 540/KMK.010/2020 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *PMK Nomor 186/PMK.01/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Intansi Vertikal DJP*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia . (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 TAHUN 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang* . Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.